

TUPOKSI
2021

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 114, BD. 2021/NO. 114 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 19 HLM.
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NO. 114 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan kualitas dan pemahaman terhadap susunan organisasi serta tugas fungsi dan tata kerja, serta menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu dicabut dan diganti. Maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- : - Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 13 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021, Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2016. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2016.
- : - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pedoman bagi pejabat dan pegawai Pemerintah Daerah guna memberikan panduan terkait Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional dan Tata Kerja.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021
- : - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 1 HLM.